SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA

STATUS TERAKREDITASI

Kantor Pusat : Jl. Salemba Raya No. 24, Jakarta Pusat Telp. 3145054, 3906060, 3905050 Fax. 3907070

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA

Nomor : 049/KT/STIE-J/VIII/2015

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MATA KULIAH PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, perlu menetapkan tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016;
 3. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan untuk pengangkatannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;
- Memperhatikan** : Usul dari Saudara Puket.I Bidang Akademik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Mengangkat Saudara : **Riyanto Wujarso, SE, Ak, MM**
 Jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli
 Mengajar Mata Kuliah :

Mata Kuliah	Sks	Hari	Waktu
- TEORI AKUNTANSI	3	Senin	19:05-21:05
- AKUNTANSI MANAJEMEN	3	Selasa	19:05-21:05

Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan akademik serta hak dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta
 Pada tanggal : 31 Agustus 2015

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
 JAYAKARTA

Drs. Sani Kristani, Ak
 Ketua

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan DPJ.
2. Para Puket & Ketua Jurusan
3. Kepala BAAK